

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achmad Ruslan, 2011. *Teori Dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Yogyakarta, Rangkang Education.
- Alfian Maulana Malik, 2016. "Penggunaan Freies Ermessen oleh Dahlan Iskan Terkait Pembangunan 21 Gardu Induk Listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara".
- Aminuddin Ilmar, 2018. *Bahan Ajar Mata Kuliah Konstruksi Teori Hukum Cetakan V*, UPT Unhas Press, Makassar.
- Andi Hamzah, 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Andi Safriani, 2013. *Hukum Administrasi Negara*, Makassar : Alauddin University Press.
- Aristoni, 2014. *Tindakan Hukum Diskresi Dalam Konsep Welfare State : Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hukum Islam*. Jurnal Penelitian, Volume 8 Nomor 2 Agustus 2014.
- Asri Lasatu, 2016. *Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Normatif Pekerja Dalam Sistem Hubungan Industrial*, Disertasi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Ateng Syafrudin, 2000. "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.
- A.V. Dicey, 1970. *The Relation Between Law and Public Opinion* dalam : Richard D. Schwartz and Jerome H. Skolnik (es). *Society and the Legal Orde*. London : Basic Books Inc Publishets New York.
- Bagir Manan, 1996. *Bentuk-Bentuk Perbuatan Keperdataan yang Dapat Dilakukan oleh Pemerintah Daerah*. *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran*, Bandung, Volume 14 Nomor 3 Tahun 1996.
- Budi Suhariyanto, Dani Elpah, 2017. *Titik Singgung Pertanggungjawaban Diskresi Pejabat Pemerintah dalam Aspek Hukum Pidana dan Administrasi*, Puslitbang Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil MA. R.I, Jakarta.
- Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta.

- D.J. Galligan, 1990. *Discretionary Power*, Oxford Press University, New York.
- Erlyn Indarti, *Diskresi dan Paradigma : Sebuah Telaah Filsafat Hukum*. Semarang, Pidato Pengukuhan yang disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- E. Utrecht, 1986. *Pengantar Hukum Administrasi Republik Indonesia*. Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- , 1994. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Pustaka Tinta Mas. Surabaya.
- Haddow, George D dan Haddow Kim S, 2009. *Disaster Communications in a Changing Media World*, Elsvier, United Kingdom.
- Indroharto, 1993. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Irwansyah, Kajian Ilmu Hukum, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2020.
- Jimly Asshiddiqie, 2013. *Komentor atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kaligis, O.C. 2008. *Praktek Tebang Pilih Perkara Korupsi Jilid I*. Bandung, Alumni.
- Kasman Lassa, 2019. *Tanggung jawab Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah*, CV. Berkat Media Bersama, Donggala.
- Krisna Djaya Darumurti, 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintahan*. Bandung, Aditya Bhakti.
- , 2016. *Diskresi Kajian Teori Hukum dengan Postscript dan Apendiks*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Laica Marzuki, 1996. *Peraturan Kebijaksanaan Hakikat serta Fungsinya*. Ujung Pandang, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Lexy J. Maleong, 1999. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- , 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Luthfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, 2016. *Hukum dan Kebijakan Publik : Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Cet. II; Malang : Setara Press.

- Liesnoor Dewi, 2010. *Erosi dan Mitigasi Bencana, (Buku Ajar) Jurusan Geografi*, Semarang, UNNES, CV. Sanggar Krida Aditama.
- Lukman, Marcus. 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional*. Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- Luthfi J. 2016. Kurniawan dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Publik : Perihal Negara, Masyarakat Sipil, dan Kearifan Lokal dalam Perspektif Politik Kesejahteraan*. Cet. II; Malang : Setara Press.
- Marcus Lukman, 1996. *Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah*. Bandung : Universitas Padjadjaran.
- Marwan Effendy, 2012. *Kapita Selekta Hukum Pidana : Perkembangan dan Isu-Isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi*. Jakarta, Referensi.
- Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Muchsan, 2011. *Catatan Materi Perkuliahan Politik Hukum*. Yogyakarta, Program Magister Hukum UGM.
- Murtir Jeddawi, 2011. *Negara Hukum, Good Governance, dan Korupsi di Daerah*, Total Media.
- Nomensen Sinamo, 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Permata Aksara.
- Nugraha dkk, 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Depok, CLGS FH UI.
- Oemar Seno Adji, 1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga.
- Ossip K. Flechteim dalam Miriam Budiardjo dalam Krishna D Darumurti, 2012. *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pearlson, Keri E dan Saunders, Carol S, 2010. *Managing and Using Information System : a Stategic Approach*, Wiley, USA.
- Philipus M. Hadjon, 1993. *Pemerintahan Menurut Hukum*. Jakarta : Yuridika.
- , 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisakti.

- Phillipe Nonet dan Philip Selznick, 2007. *Hukum Responsif*, (terj : Raisul Muttaqien), Nusamedia, Bandung.
- R.B. Gibson, 1981, *The Value of Participation*, dalam P.S. Elder, *Environmental Management and Public Participation*, Toronto : Canadian Environmental Law Association.
- Ridwan, 2009. *Diskresi (Freies Ermessen) oleh Pejabat Pemerintah : Rambu Hukum, Alat Ukur Keabsahan dan Kecermatan Dalam Penggunaannya*, Jurnal Media Hukum, Volume 16 No. 3 Desember 2009.
- Ridwan HR., 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cet. XII; Jakarta : Rajawali Pers.
- Ronald Dworkin, 1999. *Taking Rights Seriously*, Universal Lay Publishing Co. PVT.LTD, Delhi.
- Ruben, Brent D dan Steward, Lea P, 2013. *Komunikasi dan Perilaku Manusia (Penerjemah Ibnu Hamad)*, Rajawali Press, Jakarta.
- R.B. Gibson, 1981, *The Value of Participation*, dalam P.S. Elder, *Environmental Management and Public Participation*, (Toronto : Canadian Environmental Law Association, 1980
- Satjipto Rahardjo, 2009. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta, Cet. II.
- Shaw, Rajib dan Gupta, Manu, 2009. dalam Shaw, Rajib., Gupta, Manu., Sharma, Anshu (ed), *Information, Education, and Communication for Urban Risk Reduction*, Emerald, United Kingdom.
- Sjachran Basah, 1992. *Perlindungan Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu Tinjauan Secara Sosiologis)*. Jakarta : UI Press, Jakarta.
- S. Prajudi Atmosudirjo, 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta : Ghalia.

- Sri Juni Woro Astuti, 2010. *Akuntabilitas Diskresi Birokrasi di Era Otonomi Daerah*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Volume 23 Nomor 2 Tahun 2010.
- Sri Soemantri Martosoewignjo, 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Sudargo Gautama, 1983. *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung : Alumni.
- Suratman dan Phillips Dillah, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta.
- Sutarto, 1993. *Dasar-Dasar Organisasi, cet 16*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Syafruddin, Ateng. 1993. *Pengaturan Koordinasi di Pemerintahan Daerah*. Bandung, Cipta.
- , 2016. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta : Permata Aksara.
- Syamsul Bahri, 2009. *Dimensi Hukum dan Demokrasi Kehadiran Calon Presiden Independen*, Jurnal Konstitusi, Universitas Hasanuddin Makassar, Vol. I No. 1 November 2009.
- World Bank, 2000. *Anticorruption in Transition : A Contribution to the Policy Debate* Washington DC : World Bank.
- Yuswalina dan Kun Budianto, 2016. *Hukum Tata Negara di Indonesia*. Malang : Setara Press.
- Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Jurnal Hukum dan Karya Ilmiah

- Ahmad Nur Yani, "*Pola dan Strategi Penanggulangan Bencana Alam, studi kasus Tagana di Daerah Istimewah Yogyakarta*", Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2016.
- Alfian Maulana Malik, "*Penggunaan Freies Ermessen oleh Dahlan Iskan Terkait Pembangunan 21 Gardu Induk Listrik di Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara*"
- Azmi Fendri, "*Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral dan Etika*", Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 3 (September 2014-Januari 2015) hlm. 144. <https://media.neliti.com/media/publications/9154-ID-kebebasan->

bertindak-pemerintah-diskresisebagai-perwujudan-nilai-nilai-moral-dan.pdf. (Diakses 10 Februari 2020).

Bagir Manan dan Kuntoro Magnar, dirujuk Andi Nirwanto, 2015. "*Arah Pemberantasan Korupsi ke Depan Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*", Seminar Nasional HUT IKAHI, 26 Maret 2015.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, "*Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan*", *Yustisia* 5, no. 1 (Januari - April 2016), hlm. 187. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8730/7818>. (Diakses 9 Februari 2020).

Ishviati Joenaini Koenti, "*Diskresi dalam Penanggulangan Bencana di DIY dengan Paradigma Kontinjensi*", Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, 2016.

<http://dx.doi.org/10.4236/blr.2012.33017>, Yang Yang, "*Fundamental Research on the Administrative Discretion Standard*" *Beijing Law Review*, 2012, 3, 128-132 diakses 10 Januari 2014

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi/>, diakses tanggal 9 Februari 2020.

Mohammad Yuhdi, "*Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Negara*", *Jurnal Ilmiah* 15, no. 3, hlm. 79. <https://media.neliti.com/media/publications/235035-peranan-diskresi-dalam-penyelenggaraan-p-5f963a35.pdf>. (Diakses 9 Februari 2020).

Oce Madril, "*Diskresi atau Korupsi*" *Kompas*, (11 April 2021).

Polancik, 2009, dalam <https://romisatriawahono.net/2012/08/07/kiat-menyusun-kerangka-pemikiran-penelitian.>, di akses pada tanggal 16 November 2019, pukul 20.00.wita.

Rio Christiawan, 2020. "*Mengawal Perppu Covid-19*" <https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19> diakses pada 9 Mei 2020.

Risky Novialdi, "*Pengaruh Bencana Tsunami terhadap peningkatan Soft Power Diplomacy Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2004-2015*", *jurnal hukum, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2016.

Saut P. Panjaitan, 2010. "*Jaminan Perlindungan Konstitusional Hak Tiap Orang Untuk Memperoleh Informasi dan Berkomunikasi*", *Jurnal Simbur Cahaya*, Vol. 15 No. 42 Mei 2010.

C. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koorinasi Nasional Penanganan Bencana

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 48 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Perka BNPB) Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana Daerah

Peraturan Bupati Donggala Nomor 1 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Perumahan Pascabencana Gempa Bumi dan Tsunami Tahun 2018.

Peraturan Daerah Sigi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Bencana

Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

D. Sumber Lainnya

Azmi Fendri, "Kebebasan Bertindak Pemerintah (Diskresi) sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Moral & Etika", Jurnal Ilmu Hukum 4, no.3 (September 2014-Januari 2015) hlm. 144-146. <https://media.neliti.com/media/publications/9154-ID-kebebasan-bertindak-pemerintah-diskresisebagai-perwujudan-nilai-nilai-moral-dan.pdf>. (Diakses 10 Februari 2020).

Bagir Manan dan Kuntoro Magnar, dirujuk Andi Nirwanto, "Arah Pemberantasan Korupsi ke Depan–Pasca Undang Undang Administrasi Pemerintahan", Seminar Nasional HUT IKAHI, 26 Maret 2015.

Dyah Adriantini Sintha Dewi, "Pendayagunaan Freies Ermessen Pejabat Pemerintahan dalam Konsep Negara Kesejahteraan", Yustisia 5, no. 1 (Januari - April 2016), hlm. 187. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/viewFile/8730/7818>. (Diakses 9 Februari 2020).

Laporan Gubernur Sulawesi Tengah Terkait Percepatan Pemulihan Dampak Bencana Alam Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi. Palu, Sulawesi Tengah, 2018

Mohammad Yuhdi, "Peranan Diskresi dalam Penyelenggaraan Negara", *Jurnal Ilmiah* 15, no. 3, hlm. 79. <https://media.neliti.com/media/publications/235035-peranan-diskresi-dalam-penyelenggaraan-p-5f963a35.pdf>. (Diakses 10 Februari 2020).

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/arti-tujuan-lingkup-dan-contoh-diskresi/>, diakses tanggal 9 Februari 2020.

Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" *Kompas*, (11 April 2021)

World Bank, *Anticorruption in Transition : A Contribution to the Policy Debate* (Washington DC : World Bank, 2000)

<https://analisis.kontan.co.id/news/mengawal-perppu-covid-19> diakses pada 9 Mei 2020